

FENOMENA *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA SELATAN

Mohammad Dimas Ridho Aditama¹⁾, Zulkifli²⁾, Yevi Dwitayanti³⁾

^{1,2,3)}Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

email: md14ra2@gmail.com¹⁾, yevi_dwitayanti@polsri.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan dalam melakukan uji pada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Objek penelitian adalah 13 kabupaten serta 4 kota di Sumatera Selatan yang sudah memberikan laporan keuangannya di tahun 2017-2021. Teknik dalam mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan *software* SPSS 2022 metode regresi berganda. Hasil penelitian memperlihatkan jika, DAU berpengaruh secara positif positif pada Belanja Daerah Pemda Provinsi Sumatera Selatan. DAK mempunyai pengaruh secara signifikan positif pada Belanja Daerah Pemda Provinsi Sumatera Selatan. DBH mempunyai pengaruh yang signifikan positif pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. PAD memiliki pengaruh yang signifikan positif pada Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Belanja.

Kata Kunci: *Flypaper effect, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, Belanja.*

Abstract

This study aims to examine the effect of General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH) and Regional Expenditures on Regional Expenditure of the Regional Government of South Sumatra Province. The object of research is 13 regencies and 4 cities in South Sumatra which have submitted financial reports for 2017-2021. Data collection techniques through documentation techniques. Data analysis was carried out using the SPSS 2022 software with multiple regression methods. The results of the study show that the DAU has a significant positive effect on Regional Expenditures of the Regional Government of South Sumatra Province. DAK has a significant positive effect on Regional Expenditures of the Regional Government of South Sumatra Province. DBH has a significant positive effect on Regional Expenditure of the Regional Government of South Sumatra Province. PAD has a significant positive effect on Regional Government Expenditures of South Sumatra Province Expenditures

Keywords: *Flypaper effect, balancing funds, regional original income, regional spending.*

1. PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih demokratis, responsif, dan akuntabel di daerah.

Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan

daerah. Belanja daerah terdiri dari dua jenis, yaitu belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja daerah dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri, baik itu dari sektor pajak, retribusi, hasil produksi, hibah, dan lain sebagainya.

Dana perimbangan adalah transfer keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangan negara.

Flypaper effect merupakan fenomena utama dalam penelitian ini, *flypaper effect* adalah fenomena yang terjadi saat ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah terlalu menggantungkan alokasi dana transfer untuk membiayai Belanja Daerah tanpa mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki oleh daerah, disaat alokasi DAU dan DAK yang diperoleh besar, maka pemerintah daerah akan berusaha agar pada periode berikutnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus diperoleh pada porsi nominalnya, hal ini menyebabkan PAD tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah, dengan arti lain pemberian dana transfer yang seharusnya menjadi stimulus peningkatan kemandirian daerah, justru direspon berbeda oleh daerah, daerah tidak menjadi lebih mandiri, malah semakin bergantung pada pemerintah pusat, oleh karenanya akan dapat menyebabkan terjadinya fenomena *flypaper effect* tersebut.



Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 telah terjadinya fenomena *flypaper effect* pada pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa belanja daerah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggunakan lebih banyak dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah, dapat dilihat di tahun 2017 sampai dengan tahun

2021 dimana pendapatan asli daerah lebih rendah daripada dana perimbangan terhadap belanja daerah maka dapat disimpulkan bahwa di pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terjadinya fenomena *flypaper effect* dikarenakan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih banyak memakai pendapatan asli daerah daripada dana perimbangan. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dapat kita lihat perbedaannya dari penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian sekarang meneliti pada tahun periode yang berbeda yaitu tahun 2017-2021. Dan berdasarkan tabel diatas bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi di setiap tahunnya yaitu dari tahun 2017-2021 dikarenakan, pemerintah daerah lebih menguntungkan dan meningkatkan Dana transfer atau dana perimbangan dari pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Dan juga penelitian sekarang menggunakan 4 variabel yaitu DAU, DAK dan DBH serta PAD yang bisa membuat penelitian tentang fenomena *flypaper effect* ini lebih efektif dalam perbandingannya terhadap belanja daerah. Penelitian ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh DAU, DAK, dan PAD terhadap Belanja Daerah terhadap belanja daerah provinsi Sumatera Selatan baik secara parsial maupun simultan dan jika terdapat DAU, DAK dan DBH lebih besar daripada PAD terhadap Belanja Daerah, maka akan terjadi *flypaper effect*.

2. TELAAH LITERATUR

Teori keagenan dapat menjelaskan mengapa terjadi manajemen laba. Teori agensi menekankan hubungan antara manajemen dengan investor atau pemegang saham. Manajemen yang mendapatkan kepercayaan dari investor dalam mengelola perusahaan tentu memiliki informasi yang cukup komplit, berbeda dengan pemegang saham yang terbatas informasinya. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi inilah, yang dapat memicu konflik antar pihak. Perbedaan kepentingan membuat antar pihak mencoba mencari celah untuk mendapatkan keuntungan untuk mereka masing-masing (Therisa, Yohana, & Karunia Erick, 2022:3). Teori keagenan adalah teori yang dipakai dalam

penelitian ini. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal dalam sebuah organisasi (Firdaus, I, 2013:1).

Belanja Daerah

Menurut Wahyuni, A.,Siregar, E. P., (2021:7) tentang Belanja Daerah menyatakan bahwa: “Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah setiap tahunnya”. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja menurut urusan wajib ini merupakan bagian dari prinsip anggaran berbasis kinerja, dimana penganggaran dilakukan berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai dan program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil tersebut. Mengenai klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja, dibagi dalam kelompok berikut ini : 1. Belanja Tidak Langsung, Belanja tidak langsung adalah jenis belanja yang tidak menghasilkan barang atau jasa secara langsung, namun digunakan untuk membiayai kegiatan yang mendukung penyediaan barang dan jasa, atau kegiatan yang tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. 2. Belanja Langsung, Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan atau program yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau pihak ketiga dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Menurut Mardiasmo, (2016:2) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari kegiatan ekonomi atau pelayanan publik yang dikelolanya. PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat di daerah”. Sumber-sumber PAD yang dimaksud meliputi

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah dan sah-sah saja yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari dalam wilayahnya sendiri. pentingnya sumber pendapatan ini bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Semakin besar PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Oleh karenanya, peningkatan PAD harus menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum yang mengatur tentang pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk transfer keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. dana perimbangan dapat ditemukan dalam konsep desentralisasi fiskal dan prinsip keuangan negara yang baik. Desentralisasi fiskal adalah proses peralihan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam konteks ini, dana perimbangan berperan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya. Dana perimbangan juga terkait dengan konsep keadilan dan keseimbangan pembangunan antar daerah. Dana perimbangan diharapkan dapat membantu daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk dapat membiayai tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahannya secara adil dan merata, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan antar daerah.

Dana Alokasi Umum

(DAU) Menurut Nordiawan, D. (2017: 87) tentang Dana Alokasi Umum menyatakan bahwa: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi”. Dalam konteks dana alokasi umum (DAU), teori keagenan dapat membantu menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Teori keagenan menyarankan bahwa untuk mengurangi konflik keagenan dalam DAU, pemerintah pusat perlu mengembangkan sistem insentif dan pengawasan yang efektif. Pemerintah pusat dapat memberikan insentif positif kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam menggunakan DAU dengan baik.

Dana Alokasi Khusus

(DAK) Menurut Rachim, (2016:52) tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) menyatakan bahwa: “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dikemukakan bahwa penggunaan DAK perlu diatur dengan ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaan anggaran dapat terjadi apabila tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat dan ketat dalam penggunaan DAK. pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik dalam penggunaan DAK. Sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik mencakup pengendalian internal, sistem informasi, dan audit internal.

Dana Bagi Hasil

(DBH) Menurut Baldrice Siregar (2015:144) tentang Dana Bagi Hasil menyatakan bahwa: “Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing - masing daerah atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai operasional daerah dan belanja daerah, semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar pula belanja daerah yang dianggarkan pemerintah daerah.” Dalam pengelolaan DBH, termasuk dalam hal penyusunan rencana penggunaan DBH yang lebih terintegrasi dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan DBH. pengelolaan DBH harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan

prinsip tata kelola yang baik. Hal ini meliputi adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan DBH.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen: Dana perimbangan (x1), Pendapatan asli daerah (x2), dan satu variabel dependen yaitu belanja daerah (Y). Data yang digunakan pada penelitian ini data runtut waktu (*time series*) tahun 2017-2021.

Populasi Dan Sampel

Populasi pada penelitian ini kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Selatan yang mempublikasikan laporan keuangan terutama laporan realisasi anggaran tahun 2017-2021 terdiri dari 17 kabupaten dan 5 kota. Sampel dipilih berdasarkan teknik *sampling* jenuh dengan kriteria kabupaten dan kota yang memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017-2021 dan telah diaudit BPK.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah metode analisis statistik dengan menggunakan *software* SPSS 29 yang digunakan oleh peneliti dalam mengolah serta menganalisis data-data dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan cara melakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Data

Statistik deskriptif dalam penelitian yang dijalankan menampilkan total data, nilai maksimum dan minimum, nilai mean (rerata) serta standar deviasi (simpangan baku) dari variable dependen serta independen. Hasil statistik dituju digambar serta tabel dibawah ini:

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DAU	85	2.91E+11	1.35E+12	6.1590E+11	2.55126E+11
DAK	85	52897929831	4.82E+11	2.1179E+11	97826701376
DBH	85	12238694747	2.41E+12	3.6536E+11	4.23050E+11
PAD	85	27846959236	1.16E+12	1.8389E+11	2.35607E+11
Belanja Daerah	85	5.91E+11	3.97E+12	1.5117E+12	7.68178E+11
Valid N (listwise)	85				

Ditinjau dari Tabel di atas maka bisa dijelaskan jika DAU, ialah dana yang sumbernya dari perolehan APBN yang dialokasikan yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan diantar daerah dalam pendanaan keperluan daerah untuk tujuan melaksanakan desentralisasi. Total dana alokasi umum yang telah ditentukan didalam tiap tahun berdasarkan dari pengeluaran yang diselenggarakan pada keperluan. Didasari dari tabel 4.3. diatas rerata total Dana Alokasi Umum (X1) sebesar 615,903,461,490.27 dan total DAU paling rendah 291,072,818,000.00 serta total DAU paling tinggi 1,347,785,960,000.00 dengan Standar Deviasi 255,125,579,001.24 dari rata-rata.

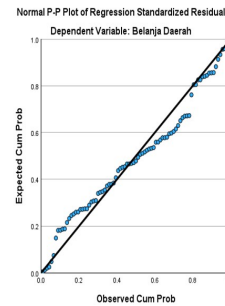
DAK, ialah dana yang sumbernya pada perolehan APBN yang di alokasikan terhadap daerah tertentu yang bertujuan dalam menolong pendanaan aktivitas khusus yang merupakan pekerjaan daerah serta mengikuti pada prioritas nasional. Jumlah DAK yang sudah ditentukan didalam tiap tahun, berdasarkan dari pengeluaran yang diselenggarakan pada keperluan. Didasari dari tabel 4.2 diatas rerata total Dana Alokasi Khusus (X2) sebesar 211,786,228,744.90 dan total DAK paling rendah 52,897,929,831.00 serta total DAK paling tinggi 481,900,223,636.00 dengan Standar Deviasi 97,826,701,376.07 dari rata-rata.

DBH ialah sebagian daerah yang asalnya pada penerimaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan, serta Bangunan Pasal 25 dan 29 WPOPDN (Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri) serta Pajak Penghasilan Pasal 21. Jumlah DBH yang telah ditetapkan didalam tiap tahun, berdasarkan dari pengeluaran yang diselenggarakan pada keperluan. Didasari dari tabel 4.2. diatas rerata total Dana Bagi Hasil (X3) senilai 365,356,701,205.51 dan total DBH paling rendah 12,238,694,747.00 serta total DBH paling tinggi 2,405,793,795,815.00 dengan Standar Deviasi 423,049,786,862.67 dari rata-rata.

PAD ialah penerimaan yang didapat setiap daerah yang asalnya setiap sumber yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan dimintai didasari dari perda mengikuti pada aturan UU yang ada. Hasil uji Statistik Deskriptif yang sudah di olah dalam ditabel 4.2 diatas bisa

terlihat jika berdasarkan total sampel (N) yang berjumlah 85. Jumlah rerata PAD (X4) sebesar 183,890,964,852.14 dimana jumlah pendapatan asli daerah terendah sebesar 27,846,959,236.30 dan PAD tertinggi 1.158.871.191.669.00 dengan standar deviasi 235,606,637,144.52.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Dari hasil Normal Probability Plot dalam Tabel diatas bisa kita ketahui jika sumbu tersebar pada sekitar garis diagonal jadi bisa kita simpulkan jika *Normal Probability Plot* memiliki distribusi dengan normal. Jadi model regresi mencukupi asumsi normalitas. Jika kita lihat secara visual grafik tersebut kelihatan normal.

Uji Multikolinearitas

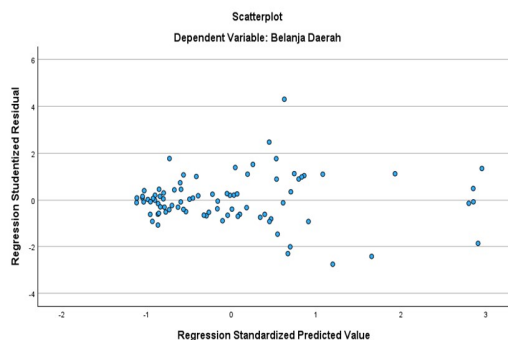
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09943509
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.062
	Negative	-.046
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.563
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.550
	Upper Bound	.576

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.
- e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Dari hasil *test of normality* di atas maka diketahui hasil pengujian normalitasnya memakai *kolmogrov-smirnov (K-S)* bisa dijelaskan jika nilai *asymptotic significance (2-tailed)* menunjukkan nilai 2% atau 0.200 > nilai α 5% atau 0.05. Dalam hal itu dapat disimpulkan bahwa residual memiliki sebaran normal.

Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan hasil *Scatterplot Model* di gambar di atas bisa kita ketahui jika tak terdapat pola yang teratur, dan setiap titik terdistribusi diatas serta dibawah angka 0 disumbu Y. Dalam hal ini bisa kita simpulkan jika tak ada Heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 ^a	.977	.975	1.13920E+11	1.745

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Didasari hasil pengujian auto korelasi bisa kita ketahui nilai Durbin- Watson bagi hipotesis senilai 1.745. Hal itu menyebabkan tidak terjadinya auto koelasi dikarenakan nilai Durbin-Watson ada di luar batas nilai DU (0.7790) dan 4-DU (3.221). Berdasarkan uji autokorelasi di ketahui nilai DW senilai 1.745. Artinya jika nilai DW ada didaerah $DU < DW < 4-DU$, yakni $0.7790 < 1.745 < 3.221$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut bisa kita simpulkan jika tak ada auto korelasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50226072864	44616083136		1.126	.264
	DAU	1.072	.128	.376	8.392	<.001
	DAK	1.528	.315	.206	4.855	<.001
	DBH	.664	.043	.387	15.376	<.001
	PAD	1.278	.079	.414	16.257	<.001

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan Tabel di atas bisa di susun persamaan regresi berganda yaitu:

$$\text{Belanja Daerah} = 50226054438.567 + 1.072 \text{ LnDAU} + 1.528 \text{ LnDAK} + 0.664 \text{ LnDBH} + 1.278 \text{ LnPAD} + e$$

Berdasarkan Model regresi tersebut dapat diartikan bahwa :

a. Nilai konstanta (a) senilai 50226054438.567. berarti jika nilai variabel DAU, DAK, DBH, serta PAD dengan nilai 0, jadi tingkat Belanja Daerah bernilai positif.

b. Nilai koefisien regresi variable DAU (b1) menunjukkan nilai positif. Berarti jika meningkatnya DAU senilai 1% jadi tingkat Belanja Daerah dapat peningkatan senilai 1.072. Namun apabila DAU turun senilai 1% jadi bisa diprediksikan mengalami penurunan senilai 1.072.

c. Nilai koefisien regresi variabel DAK (b2) menunjukkan nilai positif. Berarti jika meningkatnya DAK senilai 1% jadi tingkat Belanja Daerah akan meningkat senilai 1.528. Namun apabila DAK turun senilai 1% jadi dapat diprediksikan mendapati penurunan senilai 1.528.

d. Nilai koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil (b3) menunjukkan nilai positif. Berarti jika DBH meningkat senilai 1% jadi tingkat Belanja Daerah dapat naik senilai 0.664. Namun apabila Dana Bagi Hasil turun senilai 1% jadi dapat diprediksikan mendapati penurunan senilai 0.664.

e. Nilai koefisien regresi variabel PAD (b4) menunjukkan nilai positif. Berarti jika PAD meningkat senilai 1% jadi tingkat Belanja Daerah dapat naik senilai 1.278. Namun apabila PAD turun senilai 1% jadi dapat diprediksikan mendapati penurunan sebesar 1.278.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988 ^a	.977	.975	1.13920E+11	1.745

a. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU
b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Bedasarkan hasil analisis regresi berganda bsia kita ketahui koefisien determinasi (Adjusted R Square) senilai 0,975. Hal itu mengartikan 97,5% variabel Belanja Daerah bisa diterangkan pada keempat variabel independen yakni DAU, DAK, DBH serta PAD sedangkan sisanya senilai 2,5% diterangkan dari variabel lainnya di luar model penelitian yang dilaksanakan.

Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	50226072864	44616063136		1.126	.264
	DAU	1.072	.128	.376	8.392	<.001
	DAK	1.528	.315	.206	4.855	<.001
	DBH	.664	.043	.387	15.376	<.001
	PAD	1.278	.079	.414	16.257	<.001

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

a. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Terlihat dikolom Coefficients ada nilai sig 0,001. Nilai sig < nilai probabilitas 0,05, ataupun nilai 0,001 < 0,05. Variabel X1 memiliki thitung yakni 8,392 dengan ttabel 1.99006. Berdasarkan hipotesis penelitian bisa kita simpulkan jika disimpulkan bahwa tolak Ho1 serta terima Ha1. Artinya dengan parsial variabel independen yakni DAU memiliki pengaruh yang positif serta signifikan pada variabel dependen yakni Belanja Daerah.

b. Pengujian hipotesis kedua (H2)

Variabel Dana Alokasi Khusus dalam hasil uji parsial memperlihatkan variabel independen yakni dana alokasi khusus bernilai sig 0,001 < 0,05 serta nilai thitung yakni 4.855 dengan ttabel 1.99006. Berdasarkan hipotesis penelitian bisa kita simpulkan jika tolak Ho2 dan terima Ha2. Berarti dengan parsial variabel independen yaitu Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif serta signifikan pada variabel dependen yaitu Belanja Daerah.

c. Pengujian hipotesis ketiga (H3)

Hasil uji parsial memperlihatkan jika variabel independen yakni Dana Bagi Hasil bernilai sig 0,001 > 0,005 dan nilai thitung yakni 15.376 dengan ttabel 1.99006. Dengan demikian hipotesis penelitian bisa kita simpulkan jika tolak Ho3 serta terima Ha3. Berarti dengan parsial variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif serta signifikan pada variabel dependen yaitu Belanja Daerah.

d. Pengujian hipotesis keempat (H4)

Variabel Pendapatan Asli Daerah dalam hasil uji parsial memperlihatkan jika variabel independen yakni PAD bernilai sig 0,001 < 0,05 dan nilai thitung yakni 16.257 dengan ttabel 1.99006. Berdasarkan hipotesis penelitian bisa kita simpulkan jika tolak Ho3 dan terima Ha4. Berarti dengan parsial variabel independen yaitu PAD mempunyai

pengaruh positif serta signifikan pada variabel dependen yaitu Belanja Daerah.

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.339E+25	4	1.085E+25	835.899	<.001 ^b
	Residual	1.038E+24	80	1.298E+22		
	Total	4.443E+25	84			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), PAD, DBH, DAK, DAU

Hasil Uji statistik F ditabel diatas dalam meninjau F tabel pada uji hipotesis butuh menetapkan derajat bebas ataupun df (degree of freedom). dfl = k = 4 dan df2 = n - k - 1 = 85 - 3 - 1 = 2.486

Dengan demikian hasil yang diperoleh dari nilai F hitung senilai 835.899 dan nilai signifikansinya 0,001 hal itu artinya tingkatan signifikansinya < 5% (α = 0,05) serta F hitung senilai 835.899 > F-tabel senilai 2.486 yang berarti bisa kita simpulkan jika Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan PAD dengan bersamaan berpengaruh secara signifikan dalam Belanja Daerah.

5. SIMPULAN

Penelitian yang dilaksanakan memiliki tujuan dalam memperoleh bukti empiris tentang kemungkinan adanya *flypaper effect* dalam belanja daerah Kota /Kabupaten Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian yang dilaksanakan memakai analisis data panel, total sampel yang dipakai pada penelitian yang dilakukan senilai 2416 data dari tahun 2009-2013. Penelitian yang dilakukan memakai variabel independen PAD, DAU, DAK, serta DBH. Didasari dari hasil analisis memperlihatkan jika variabel PAD, DAU, DAK serta SBH memiliki pengaruh positif pada belanja daerah. Hasil analisis pun memperlihatkan jika PAD, DBH dan DAU berpengaruh pada belanja daerah. Berdasarkan masing-masing variabel, koefisien dana bagi hasil, dana alokasi khusus dana alokasi umum, serta lebih kecil dari pada koefisien pendapatan asli daerah senilai 0,414. Hasil uji mengindikasikan jika tidak terjadi fenomena *flypaper effect* terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena flypaper effect tidak ada dikarenakan respon belanja daerah sumbernya lebih besar apda PAD tersebut. Hal itu memperlihatkan jika daerah

Kota/Kab di Provinsi Sumatera Selatan sudah dapat membuat aspek kemandirian yang dicirikan pada mencukupinya daerah untuk manajemen pendapatan asli daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Ansharullah Tasri. (2018). *The Flypaper Effect Phenomenon: Evidence from Indonesia*, Vol 2 No.1, PP, 21-26.

Ari Mulianta Ginting. (2019). *Analisis Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Utara.*

A,R,Patta.,J.J.Tinangon.,S,K.Walandouw. (2017). *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Sulawesi Utara : Universitas Sam Ratulangi Manado.

Asriati, D. Wahidwati. (2017). "Flypaper effect pada DAU DAK dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.6 No.10, PP, 1-20.

Dermawan,Wildan Dwi. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah*. Jawa Barat : Universitas Galuh Ciamis.

Endang Larasati, *Paradigma Baru Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya*. Indonesia.

Fadilah,Haris.,Helmayunita, Nayang. (2020). "Analisis Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 2 No.3.

Fama,E.F. (2020). *Agency Problems and the Theory of the Firm Journal of Finance*, 75(1), 5-30. Ghozali, (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Kurniat,Herlina.,Devi,Yulistia. (2022). "Pengaruh Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016-2019 dalam perspektif ekonomi islam". *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 7. No.2.

Melda,Helmi.,Syofyan. (2020). "Analisis Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 2 No.2.

Moleong, Lexy J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke- 36, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Offset.

Nur,Rahmat.,In,Feri. (2023). "Analisis Flypaper effect Pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan SiLPA terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol 5 No.1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang mekanisme pendistribusian dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.

Rusman. (2011). *Model – Model Pembelajaran*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian , Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-23. Bandung : Alfabeta.

Siti,Tia Rohmah. (2020). "Pengaruh Analisis Flypaper effect Pada Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah

- terhadap Belanja Daerah”. Riau : Universitas Siliwangi.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: PTAlfabet.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta.
- Unjaswati, Hita Ekawarma. (2017). “Analisis Flypaper effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Provinsi Jambi”. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4 No.3.